

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ameliah, Rangga Adi Negara, Bahtiar Minarto, Tonggo Marito Manurung, Maulana Akbar, Rizki, 2022, *Status Literasi Digital di Indonesia 2022*, Kominfo, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Didik Sukriono, Winardi, Sirajuddin 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan*, Setara Press, Malang.
- Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Halim Barkatulah, Abdul, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- H. Zainal Asikin, Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nazir, Muhammad, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bahkti, Bandung.
- S. Soetiono, Kusumaningtuti, 2017, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, OJK, Jakarta.

Sulastriyono, 2014, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum – Program Sarjana Mata Kuliah Wajib*, Bahan Kuliah, Rencana Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester dan Bahan Ajar”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Press, Jakarta.

Sujamto, 1994, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Afreda dan Sugi Rahayu, Donna, “Kontribusi Satga Waspada Investasi dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *JOPPAR Journal Of Public Policy and Administrasi* , Vol.3, No. 5, April 2018.

Gede Arya Raditya Januriawan dan Ida Ayu Sukiha, I, “Indikasi Praktik Bank Gelap dalam Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 8, November 2020.

Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Ratna, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustu*, Vol. 25 No. 2, Mei 2018.

Kandly, Irwansyah, Erga, “Fenomena Aplikasi Kredit dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia”, *Komunikasi dan Kajian Media*, Vol.4, No. 1, April 2020.

Mega Andhini, Cheysza, “Problematika Hukum Pada Peer-to-Peer Lending di Indonesia dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, *Jurist Diction*, Vol. 2, No. 6, November 2019.

Putu Gede Wirawan dan I Wayan Novy Purwanto, I, “Keabsahan Perjanjian Fintech Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 5, Juni 2021.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Herman, Gusti, 2020, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis online menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (studi OJK Pekanbaru)”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Negeri Syarif Kasim, Riau.

- Kartika Maharani, Devi, 2020, “Analisis Mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pengawasan Usaha Financial Technology”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- M. Ahmad, dkk, 2008, “Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)”, Hasil Penelitian, BPHN, Jakarta.
- Wayan Bagus Pramana, dkk, I, 2018, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending”, *ringkasan skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Yusuf, Muhammad, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

D. Makalah/Pidato

- Joko Irianto, Tomi, “Pengaturan dan Perkembangan Fintech Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”, *Seminar, Webinar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal bertema Perkembangan Terbaru Peer To Peer Lending di Indonesia berdasarkan POJK No. 10/POJK.05/2022*, Jakarta, 15 Februari 2023, diakses dalam <https://www.youtube.com/watch?v=7BSLzYJctA4> pada 13 Juni 2023.

E. Internet

- Alvetro, Yoki, “Fintech Ilegal di Jakut Dibongkar polisi, Bos-DebtCollector Ditangkap”.<https://news.detik.com/berita/d-4833685/fintech-ilegal-di-jakut-dibongkar-polisi-bos-debt-collector-ditangkap>, diakses 2 Juni 2022.
- Biro Umum Humas & Protokol Sekretariat DIY, “Satgas Pengurus Waspada Investasi OJK Dikukuhkan”, http://biroumum.jogjaprovo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1299:satgas-pengurus-waspada-investasi-ojk-dikukuhkan&catid=1:latest-news&Itemid=18, diakses 5 Januari 2023.
- Irani Utamy, “Penyalahgunaan Data Pribadi di Aplikasi Pinjol Cairin, OJK Sebagai Pengawas Tidak Memberikan Solusi”, <https://mediakonsumen.com/2022/04/21/surat-pembaca/penyalahgunaan-data-pribadi-di-aplikasi-pinjol-cairin-ojk-sebagai-pengawas-tidak-memberikan-solusi>, diakses 19 Desember 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, “Yuk mengenal Fintech! Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun”
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, diakses 10 Juni 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “Jangan Keliru Lagi, Ada 12 Lembaga dalam SWI termasuk OJK”,
<https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20588>, diakses 19 Desember 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, “Satuan Tugas Waspada Investasi”,
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/117>, diakses 19 Desember 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, “Yuk mengenal Fintech! Keuangan digital yang tengah naik daun”,
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, diakses 30 Januari 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: OJK Perkuat Operasional Fintech Peer to Peer Lending”,
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-.aspx>, diakses 17 Desember 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. “Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022”,
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>, diakses 30 Mei 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “Tujuan Satgas”,
<https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Tujuan-Satgas.aspx>, diakses 26 Mei 2023

Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: OJK Perkuat Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peresmian Lokasi Baru Kontak 157”,
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Layanan-Konsumen-Sektor-Jasa-Keuangan,-Peresmian-Lokasi-Baru-Kontak157.aspx#:~:text=Masyarakat%20juga%20dapat%20menggunkan%20layanan,%40ojk.go.id>, diakses 4 Juni 2023.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6246).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6507).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788).

Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6142).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang
Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi.